POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IK: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

IK : Indeks Kualitas Air

Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup
IK : Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup

1. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
IK : Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJPD/RPJMD

1. Terlaksananya kegiatan penyelenggaran (KLHS) Kabupaten/Kota
IK : Jumlah dokumen KLHS yang dipantau dan dievaluasi

Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup IK : Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi

1. Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi.
IK : Persentase peningkatan status mutu air sungai dan danau di Kota Jambi
2. Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi.
IK : Persentase peningkatan status mutu air sungai dan danau di Kota Jambi.
3. Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi.
IK : Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup.

1. Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
IK : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2. Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
IK : Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK
3. Terlaksananya Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air. Udara dan Laut
IK : Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)
4. Terlaksananya Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
IK : Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
5. Terlaksananya Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
IK : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun
6. Terlaksananya pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
IK : Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
IK : Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dibidang lingkungan hidup.

1. Terlaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
IK : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan.
2. Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
IK : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
3. Terlaksananya pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup.
IK : Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya.

IK : Indeks Kualitas Udara

Meningkatnya persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup.
IK : Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
IK : Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup

1. Terlaksananya pengelolaan pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota
IK : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
2. Terlaksananya Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
IK : Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi

IK : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
IK : Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan

1. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi.
IK : Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi.

1. Terlaksananya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
IK : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.
IK : Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola
3. Terlaksananya pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan.
IK : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan

IK : Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber

Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
IK : Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup

1. Terselenggaranya penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IK : Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya

1. Terlaksananya Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
IK : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
IK : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan

IK : Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani

Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) IK : Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

1. Terlaksananya penyimpanan sementara limbah B3
IK : Persentase penyimpanan sementara limbah B3.
2. Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
IK : Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitasi isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan

1. Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
IK : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
IK : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3.
3. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
IK : Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang

Meningkatnya persentase pengelolaan persampahan
IK : Persentase pengelolaan persampahan

1. Terlaksananya pengelolaan persampahan.
IK : Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
IK : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.
2. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan.
IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana
Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun
Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.
Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada.
3. Terlaksananya Penanganan sampah melalui pengangkutan
IK : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan.
4. Terlaksananya Pengurangan Sampah melalui pendauran ulang sampah
IK : Jumlah sampah yang terdaur ulang
5. Terlaksananya Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
IK : Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST